



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. SISWANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 19 Januari 2026,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA  
TENGAH,



(Dr. SISWANTO S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO  
TAHUN 2026**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	72%
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		aset negara	
3	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82%
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 326.523.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp 12.064.326.000
Jumlah		Rp 12.390.849.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Semarang, 19 Januari 2026,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA  
TENGAH,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. SISWANTO S.H., M.H.)



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BENI PRIHATMO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
UMUM,

(BENI PRIHATMO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi	89%
2	Meningkatnya penegakan hukum yang yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
3	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86%
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
5	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri	Rp. 72.953.000
2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 4.649.000
3	Restorative Justice Tindak Pidana Umum	Rp. 1.743.000
Jumlah		Rp. 79.345.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
UMUM,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

(BENI PRIHATMO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDY ABDILLAH, S.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., .M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

(DEDY ABDILLAH, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100%
2	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3,7
3	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81%
		Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3,7
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
7	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 1.305.000
2	Pengelolaan Halo JPN di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 1.065.000
3	Pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 427.000
4	Pendampingan hukum pengelolaan dana desa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 4.380.000
5	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 5.265.000
Jumlah		Rp 12.442.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

(DEDY ABDILLAH, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.) (MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Kepentingan Pemangku	Tingkat Pemahaman Masyarakat atas Materi Hukum Sosialisasi	84%
		Tingkat Kepuasan Pemangku terhadap Layanan Lukumpenkum	3,7

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83%
3	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penerangan Hukum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 1.837.000
2	Kegiatan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 28.842.000
3	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 959.000
4	Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 2.710.000
5	Kampanye anti korupsi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Rp 1.842.000
Jumlah		Rp 36.190.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Layanan Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.) (MUHAMMAD AGUNG WIBOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF YULI HARYANTO, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

  
(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

  
(ARIF YULI HARYANTO, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI	Nilai SAKIP Kejaksaan Negeri Sukoharjo	82
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI	Nilai Kinerja Anggaran Kejaksaan Negeri Sukoharjo	90,25
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen dan kesehatan yustisial	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	3,7
5	Meningkatnya kompetensi Aparatur Kejaksaan RI	Persentase aparatur yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai jabatan	65%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri Sukoharjo	82%

No	Kegiatan	Anggaran
Layanan Perkantoran		
1	Gaji dan Tunjangan	Rp 10.635.464.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 1.428.862.000
Jumlah		Rp 12.064.326.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

-

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 20 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

(ARIF YULI HARYANTO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADHIEM WIDIGDO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 02 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

(ADHIEM WIDIGDO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91%
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91%
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4,1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4,1
		Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4,1

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan barang bukti/sitaan/rampasan	Rp 50.000.000
2	Pemusnahan barang bukti/sitaan/rampasan	Rp 50.000.000
3	Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Rp 50.000.000
Jumlah		Rp 150.000.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

-

#### E. KINERJA TAMBAHAN

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 02 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,



(TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

(ADHIEM WIDIGDO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARDIANSYAH, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukoharjo, 02 Februari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,



(Dr. TITIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,

(ARDIANSYAH, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026**

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63%
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan TPPU	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana kepabeanaan dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana cukai dan TPPU	85%
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan TPPU	52%
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76%
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28%
		Tingkat keberhasilan pembayaran denda dalam penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU (Kepabeanaan, Perpajakan, Cukai, tindak Pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara)	36%
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam <i>Case Management System</i>	86%
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
6	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan	Rp 5.905.000
2	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan	Rp 19.412.000
3	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan	Rp 22.059.000
4	Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang	Rp 1.170.000

No	Kegiatan	Anggaran
	Terpidananya Ditahan dalam Rumah Tahanan	
	Jumlah	Rp 48.546.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

-

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sukoharjo, 02 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
SUKOHARJO,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA  
KHUSUS,



(DETTIN HERAWATI UTARA, S.H., M.H.)

(ARDIANSYAH, S.H., M.H.)